

**BAB III**  
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MILITER JEPANG MELAKUKAN**  
**KEJAHATAN PERANG BERUPA PERBUDAKAN SEKSUAL**  
**(JUGUN IANFU) DI INDONESIA TAHUN 1942 - 1945**

Bab ini berisi analisis pokok dari penelitian. Pada bab kedua telah membahas tentang Militer Jepang sebagai sebuah organisasi dan semua kebijakan yang dilaksanakan pada masa Perang Dunia II khususnya di Indonesia, termasuk kebijakan Jugun Ian-fu atau *Comfort System*. Bab ketiga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi militer Jepang melakukan kejahatan perang berupa perbudakan seksual atau jugun ianfu di negara-negara pendudukannya, khususnya Indonesia dari sudut pandang teori *Organizational Culture* dari Konstruktivisme.

Secara sederhana, bab ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama menjelaskan doktrin militer Jepang yaitu *Imperial Rescripted Armed Forces* yang menjadi faktor utama pendorong militer Jepang melakukan kejahatan perang, khususnya perbudakan seksual. Bagian kedua berisi kedudukan Kaisar Jepang dalam militer Jepang yang mendorong pembentukan sistem jugun ianfu. Bagian ketiga berisi bentuk Sistem Jugun Ianfu yang diterapkan militer Jepang di Indonesia. Dan bagian keempat berisi kesimpulan dari bab ini.

### 3.1 Doktrin Militer Jepang “*Imperial Rescripted Armed Forces*”

Salah satu variabel yang dapat menjelaskan kejahatan perang menurut konstruktivis adalah faktor budaya. Perang dilakukan oleh personil militer, maka untuk memahami motivasi aktor dalam melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum perang kita perlu melihat ‘budaya organisasi’ yang mereka anut. Budaya organisasi (*organizational culture*) adalah seperangkat asumsi, nilai, norma, keyakinan, dan pengetahuan formal yang bersifat mendasar yang membentuk pemahaman kolektif. Budaya organisasi sama seperti ideologi yang mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan tindakan individu yang termasuk di dalamnya. Dalam sebuah organisasi militer, budaya organisasi ini berbentuk doktrin militer yang membentuk kepatuhan para personil militer terhadap tujuan perang negaranya dan komando dari atasannya, sehingga mereka cenderung mengabaikan hukum humaniter internasional. Setiap kelompok atau organisasi formal memiliki budaya organisasi khas yang membedakannya dengan kelompok lain. Dalam sebuah organisasi militer, budaya organisasi mempengaruhi bagaimana para tentara memahami apa tujuan yang ingin mereka capai, menafsirkan realitas yang mereka hadapi, dan menentukan langkah-langkah yang paling efektif untuk memenangkan perang (Rosyidin, 2017: 43).

Jepang adalah negara yang menganut sistem Kekaisaran, semua perintah awal datang dari Kaisar (sebagai pemimpin tertinggi negara). Awal imperialisme Jepang muncul ketika Restorasi Meiji 1868 dimana kekuasaan tertinggi dikembalikan ke tangan Kaisar, bukan lagi dipegang oleh Keshogunan. Paska Perang Dunia I, Jepang terobsesi untuk menjadi “*world economic super power*”. Sehingga ketika Restorasi Meiji terjadi, muncul slogan “Mari Serang Korea”. Korea akan digunakan sebagai langkah awal untuk menguasai China dan menguasai negara-negara lain hingga Jepang menjadi pusat dari dunia. Paska Restorasi Meiji, Kaisar Jepang membentuk militer modern Jepang yang diberi nama Angkatan Kekaisaran Jepang yang tunduk pada perintah Kaisar. Kaisar Jepang kemudian memberikan slogan “*Hokojin Nanbutsu*” (Bangsa di Utara, Bahan di Selatan). Utara dalam hal ini berarti bangsa barat yang modern sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan sasaran yang harus dijangkau atau

dilampaui. Sedangkan Selatan berarti Asia yang terbelakang yang dapat dimanfaatkan untuk eksploitasi sumberdaya alamnya. Slogan ini berasal dari pepatah kuno Jepang yang dipercayai oleh masyarakat Jepang. Selain *Hokojin Nanbutsu*, semboyan “*sonno joi*” yang artinya “lindungi kaisar” dan “*fukoku kyohei*” yang artinya “negara sejahtera, tentara kuat” merupakan semboyan yang dipercayai oleh pemimpin-pemimpin Jepang dan masyarakat Jepang paska Restorasi Meiji 1868. Ketiga semboyan inilah yang mendorong Jepang dan militernya melakukan agresi ke negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara (Mauriello, 1999: 54).

Militer Jepang memiliki ikatan yang erat dengan Kaisar. Hal ini dikarenakan militer Jepang dibentuk langsung atas perintah dari Kaisar Meiji paska Restorasi Meiji 1868. Sehingga, militer Jepang diberi nama Angkatan Kekaisaran Jepang. Selain itu, Posisi kementerian pertahanan memiliki kedudukan yang sangat kuat dikarenakan kementerian pertahanan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen tetapi langsung terhadap kaisar. Hal tersebut menyebabkan kementerian pertahanan Jepang menjadi Gunbatsu (Pemerintahan Diktator Militer) karena terbentuknya prinsip “*independence of the military command*” yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Jepang. Militer Jepang memiliki akses langsung kepada Kaisar (*iaku joosoo*) melalui pejabat militer yang ditunjuk (Buck, 1971: 8-9).

Pada tanggal 4 Januari 1882 Kaisar Meiji bertitah kepada prajurit dan pelaut perang Jepang yaitu *Imperial Rescript Armed Forced* (軍人勅諭 *Gunjin Chokuyu*) yang berisi 2700 dokumen kanji yang harus dihafalkan oleh personil militer Jepang. Salah satu slogan dalam titah Kaisar ini adalah “Tugas lebih berat daripada gunung, sedangkan kematian lebih ringan daripada sehelai bulu” (Buck, 1971) 7. Dalam titah tersebut tercermin upaya negara Jepang dalam menanamkan nilai keprajuritan terhadap setiap pasukannya. Titah tersebut menjadi dasar perilaku yang menekankan kesetiaan mutlak, disiplin, keberanian, harga diri dan kesederhanaan terhadap kaisar dalam mencapai kebangkitan dari masa lalu feodal menjadi negara yang berjaya di dunia imperial (Jowett, 2002: 19).

*Imperial Rescript Armed Forced* ditulis oleh Inoue Kowashi (negarawan) dan Yamagata Aritomo (Menteri Angkatan Darat Kekaisaran Jepang), dan diketik oleh Fukuchi Gen'ichiro seorang jurnalis kekaisaran Jepang. Titah Kaisar Meiji ini disampaikan secara langsung kepada Menteri Angkatan Darat Yamagata Aritomo dalam upacara khusus yang diadakan di Istana Kekaisaran Tokyo. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dimaksudkan untuk melambangkan ikatan pribadi antara Kaisar dan militer. Kaisar menjadikan militer Jepang sebagai tentara pribadinya. Titah Kaisar Meiji ini menekankan kesetiaan mutlak dari setiap anggota militer kepada Kaisar. dalam titahnya, Kaisar Meiji juga menyarankan personel militer untuk mencerminkan kembali tradisi samurai (bushido) yang menjunjung tinggi tujuan dan tugas. *Imperial Rescript Armed Forced* ini juga berisi sejumlah tema Konfusianisme termasuk "penghormatan yang pantas kepada atasan," (Tsunoda, 1958: 68).

Dalam *Imperial Prescript Armed Forced* terdapat lima point utama titah Kaisar Meiji, yang berisi:

1. Perajurit dan Pelaut Jepang harus menjunjung tinggi kesetiaan terhadap tugas yang diberikan kepadanya walaupun dengan konsekuensi kematian. Anggota militer Jepang harus memenuhi tugasnya dengan sepenuh hati sebagai wujud kesetiaan pada kaisar dan negara, serta menjunjung slogan “tugas lebih berat daripada gunung, sementara kematian lebih ringan daripada bulu”.
2. Perajurit dan pelaut Jepang harus patuh kepada Kaisar dan menunjukkan kerendahan dirinya, serta hormat pada perintah atasan.
3. Perajurit dan pelaut Jepang harus memiliki keberanian dan prinsip yang kuat.
4. Perajurit dan pelaut Jepang harus menjunjung kesetiaan dan kebenaran. Kesetiaan dalam menjaga perkataannya dan kebenaran dalam memenuhi tugas-tugasnya.
5. Perajurit dan pelaut Jepang harus menyederhanakan tujuan mereka sejak awal, agar dapat mencapai tujuan tersebut (Tsunoda, 1958: 70).

Disamping mengeluarkan titah ini, kaisar juga membentuk pelatihan khusus bagi militer Jepang berupa pelatihan spiritual militer (Seishin Kanyoo) yang bertujuan untuk mendoktrin anggota militer dengan nilai-nilai kekaisaran,

yaitu keagungan kaisar dan kewajiban mutlak untuk patuh dengan kaisar, pengabdian kepada negara, pentingnya pertahanan negara, dan rela mengorbankan diri demi negara dan kaisar apabila keadaan darurat muncul (Buck, 1971: 9). Pelatihan ini juga memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam salah satu paragraf Buku Panduan Pelatihan Militer:

*“...The state of training permits us to overcome the enemy's material and quantitative superiority by exploiting our efficiency under the single command of the Emperor, despite our inferiority. If one wishes to be victorious in war, he must be conspicuously superior in the matter of training (in time of peace). Therefore, those charged with training must always maintain this spirit, exhaust all knowledge and ability, be assiduous in the thoroughness of training, and hereby make possible complete victory through belief therein.”* (Buck, 1971: 8-9).

Pernyataan ini membuktikan bahwa militer Jepang tunduk dibawah komando tunggal dari kaisar selama kondisi perang, sehingga semua perintah perang pertama kali datang dari kaisar. *Imperial Prescript Armed Forced (Gunjin Chokuyu)* inilah yang menjadi doktrin militer Jepang. setiap anggota militer Jepang diharuskan untuk menghafalkan Gunjin Chokuyu dengan sepenuh hati, bersama dengan Konstitusi Kekaisaran 1899, dan Dekrit Kekaisaran tentang pendidikan militer (Koiku Chokugo) 1890, yang berfungsi sebagai ideologi Angkatan Kekaisaran Jepang hingga tahun 1945 (Eisei, 2000: 102). Doktrin ini tidak hanya berlaku ketika kepemimpinan Kaisar Meiji, tetapi juga Kaisar Hirohito yang membawa Jepang pada Perang Dunia II. Dengan adanya doktrin ini ditambah dengan adanya pelatihan spiritual militer yang bertujuan sebagai pemantapan doktrin ini, setiap personil militer Jepang akan tunduk terhadap semua perintah Kaisar sebagai perintah bersama tanpa harus menggunakan alasan moral atau alasan yang rasional (Hicks, 1995: 256). Doktrin inilah yang menyebabkan militer Jepang tidak menghiraukan hukum internasional dalam kondisi perang, sehingga berbagai bentuk kejahatan perang, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual dilakukan oleh personil militer Jepang.

Doktrin *Imperial Prescript Armed Forced* juga digunakan militer Jepang ketika menyerang China dalam Perang Sino-Jepang yang dimulai tahun 1937. Militer Jepang yang saat itu memiliki tujuan untuk mematahkan kekuatan China

dan menduduki China, melakukan segala cara sesuai dengan perintah atasannya. Akibatnya, pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan masal dilakukan militer Jepang ketika menyerang Nanking tahun 1937. Kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan menjadi salah satu strategi militer bagi Angkatan Kekaisaran Jepang karena hal tersebut dianggap normal untuk “kebutuhan” militer Jepang (Aksular, 2010: 8).

Ketika Jepang menyerang wilayah Nanking pada tahun 1937, perintah pemerkosaan terhadap wanita-wanita China diberikan secara langsung oleh pemimpin militer Jepang, sehingga terjadilah peristiwa *Nanking Rape* yang menimpa 20.000 wanita china. Setelah memperkosa wanita-wanita China yang ditemui, militer Jepang akan langsung membunuhnya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari Makihara Nobuo seorang veteran Resimen Invanteri ke-20, Divisi 16 dalam diarilya tertanggal 29 November 1937:

*Depart from the village at 9:00 a.m. Various units compete to enter the town. The tank unit also starts. In contrast with yesterday, there are no traces of the enemy at all. Enter the town magnificently, passing an impressive temple (even though there are many temples in China)... Because Wu Jing is an anti-Japanese stronghold, we carry out “mopping up” [sōtō] operations in the entire town, killing all men and women without distinction and free to rape all women. The enemy is nowhere to be seen, either because they have lost the will to fight after their defense line at Wu Xi was breached or they are holding strong positions further ahead. So far I haven't seen a town so impressive as this one (Drea & Yang, 2006: 8).*

Perintah lain juga datang dari salah satu pemimpin militer Jepang, “*So that we will not have any problems on our hand, either pay them money or kill them in some obscure place after you have finished*” (Drea & Yang, 2006: 9). Perintah ini diberikan oleh pemimpin militer Jepang setelah perintah “pemusnahan masal” diberikan. Hal ini membuktikan kuatnya doktrin militer Jepang yang menempatkan bawahan harus mematuhi perintah atasan, sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan secara brutal oleh personil militer Jepang ketika menginvasi Nanking tahun 1937.

Keterangan lain juga diberikan oleh James M. McCallum seorang misionaris Amerika yang berada di Nanking ketika peristiwa Nanking 1937

terjadi. *"Never I have heard or read such brutality. Rape! Rape! Rape! We estimate at least 1,000 cases a night and many by day"* (Oliver, 2018). Pernyataan lain juga diberikan dari laporan International Committee (sekelompok orang asing yang mendirikan Zona Keselamatan untuk menyediakan perlindungan bagi para korban Nanking Rape):

*"On December 16, seven girls (ages ranged from 16 to 21) were taken away from the Military College. Five returned. Each girl was raped six or seven times daily. One old woman 62 years old went home near Hansimen and Japanese soldiers came at night and wanted to rape her," read another report from the committee. "She said she was too old. So the soldiers rammed a stick up her. But she survived to come back"* (Oliver, 2018).

Peristiwa pemerkosaan dan perbudakan seksual masal yang terjadi di Nanking merupakan contoh awal penerapan doktrin militer Jepang dalam kondisi perang. Pola serupa juga dilakukan militer Jepang di negara-negara pendudukannya yang lain seperti Korea, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Ketika Jepang pertama kali mendarat di wilayah Indonesia, banyak wanita Indonesia dan gadis Belanda yang diperkosa oleh tentara Jepang di Tarakan, Manado, Bandung, Padang, dan Pulau Flores. (Oktorino, 2016: 261). Hal ini dibuktikan dari pengakuan seorang veteran Jepang di wilayah Indonesia bernama Anji Kaneko, berkata: *"Bukan masalah bagi kami jika wanita itu hidup atau mati. Kami adalah prajurit Kaisar. Entah di rumah-rumah bordil militer atau di desa-desa, kami akan melakukan perkosaan tanpa rasa ragu"* (Komnas HAM, 2010). Pengakuan dari Anji Kaneko ini membuktikan bahwa personil militer Jepang merasa memiliki kedudukan yang tinggi sebagai perajurit Kaisar, sehingga dapat melakukan pemerkosaan dan perbudakan seksual di wilayah Indonesia sebagai negara pendudukannya karena telah mendapatkan persetujuan dari Kaisar.

Doktrin militer Jepang yaitu *Imperial Restricted Armed Force* tidak terlepas dari peranan utama Kaisar Meiji dalam mencetuskan peraturan tersebut. Doktrin inilah yang melandasi segala tindakan personil militer Jepang di medan perang. Begitupun ketika Perang II (1939-1945) terjadi, Angkatan Kekaisaran Jepang tetap menganut doktrin ini dalam pengambilan setiap kebijakan perang.

Akibat adanya doktrin ini, sistem perbudakan seksual (*jugun ianfu*) dibentuk oleh militer Jepang di negara-negara pendudukannya, termasuk Indonesia.

### **3.2 Kedudukan Kaisar dalam Militer Jepang yang Mendorong Pembentukan Sistem *Jugun Ianfu***

Kewajiban pertama dan yang paling utama bagi seorang Jepang adalah mengetahui posisi dirinya dalam hubungan dengan orang lain. Kepatuhan orang Jepang kepada jenjang hierarki menjadi dasar dalam hubungan antar orang dengan orang lainnya dan antara seseorang dengan negara. Sistem hierarki ini sangat kental dalam kehidupan masyarakat Jepang yang cenderung aristokratik. Setiap penghormatan atau pemberian salam, setiap kontak antara satu dengan yang lainnya, selalu mengandung petunjuk tentang kedudukan, atau derajat dan jarak sosial antara seseorang dengan orang lain. Jenjang hierarki berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pangkat/kedudukan dalam organisasi (Hicks, 1995: 254).

Militer Jepang juga menganut sistem hierarki yang sangat kuat semenjak sebelum Restorasi Meiji 1868. Sistem hirarki ini berdasarkan usia dan kepangkatan dalam militer. Hal ini terbukti dari adanya slogan “perintah atasan adalah mutlak untuk dilaksanakan”. Karena adanya sistem hirarki ini, tentara-tentara yang memiliki pangkat rendah akan dengan sukarela melakukan segala perintah dari atasannya meskipun itu adalah perintah yang melanggar hukum perang. “Kepercayaan” dan “semangat kelompok” adalah hal yang sama bagi semua prajurit Jepang dan dianggap banyak prajurit sebagai dasar keberadaan yang bersikap mutlak (Jowett, 2002: 76). Di dalam doktrin *Imperial Restricted Armed Force* point kedua berisi “Perajurit dan pelaut Jepang harus patuh kepada Kaisar dan menunjukkan kerendahan dirinya, serta hormat pada perintah atasan” menunjukkan adanya sistem hierarki yang kuat dalam militer Jepang. Personil militer wajib patuh dan tunduk pada setiap perintah pimpinan militer dan kaisar. Apabila personil militer tidak patuh, maka akan dianggap mengkhianati negara (Tsunoda, 1958: 73).

Kedudukan Kaisar dalam negara Jepang sebagai keturunan dewa matahari, sehingga bersifat sakral dan tidak dapat dianggu gugat. Kaisar tidak

dapat diturunkan dari tahtanya dengan alasan apapun dan tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya jika melampaui batas hukum dalam menjalankan pemerintahan. Perdana menteri dan organ pemerintahan lainnya dibebankan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, sehingga kritik tidak dapat ditujukan kepada kaisar melainkan kepada pemerintahan saja. Hukum tidak dapat diberlakukan kepada kaisar, karena kaisar tidak menjadi subjek hukum bagi hukum manapun (Buck, 1971: 8-9).

Dalam Konstitusi Meiji 1889, kedudukan kaisar terhadap militer Jepang ditegaskan dalam Pasal 11 *“The Emperor has the supreme command of the army and navy (Gunreiken)”* dan Pasal 12 *“The Emperor determines the organization and peace standing of the Army and Navy (Gunseiken)”* (Ito, 1889). Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anggota militer Jepang harus patuh dan menjunjung tinggi segala perintah dan mandat dari kaisar karena kaisar memiliki kedudukan tertinggi dan memiliki kontrol penuh atas organisasi militer Jepang (Angkatan Kekaisaran Jepang). Kaisar juga memiliki wewenang untuk menyatakan perang, sebagaimana tercantum dalam pasal 13 *“The Emperor declares war, makes peace, and concludes treaties (Gunji Taiken)”* (Ito, 1889). Sehingga setiap kebijakan yang diambil militer Jepang dalam kondisi perang harus atas persetujuan dan perintah dari kaisar sebagai otoritas tertinggi.

Dalam kasus perbudakan seksual, perintah datang langsung dari kaisar yang kemudian diteruskan oleh petinggi-petinggi militer Jepang, sehingga pembentukan *“comfort system”* dilaksanakan oleh seluruh personel militer Jepang dengan terstruktur. Sistem jugun ianfu sendiri pertama kali dibentuk pada tahun 1932 atas perintah dari Kaisar Hirohito yang disampaikan melalui Jendral Okabe Naosaburo dan Okamuji Yauji. Sistem jugun ianfu ini pertama kali diterapkan di Shanghai ketika militer Jepang pertama kali menginvasi China. Perintah resmi isi berisi pembentukan *“army comfort houses”* yang kemudian diorganisir secara resmi oleh militer Jepang (Molnar, 2018). Sistem jugun ianfu ini juga diterapkan di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, termasuk Indonesia.

Pembentukan sistem jugun ianfu ini didasarkan atas pemikiran kaisar yang mengetahui bahwa personel militernya mengalami keletihan secara mental

akibat perang yang berkepanjangan, sehingga sering terjadi peristiwa pemerkosaan oleh oknum personil militer Jepang. Hal ini berbahaya karena dapat berdampak pada kesehatan personil militer, yang berisiko terkena penyakit menular seksual. Padahal, militer Jepang harus dipersiapkan secara lahir dan batin untuk memenangkan Perang Asia Raya. Sehingga, agar kualitas militernya terjaga, kaisar memerintahkan pembangunan *comfort station* yang bertujuan untuk memulihkan psikologis para personil militernya melalui layanan pemenuhan kebutuhan biologis yang disediakan oleh wanita-wanita di daerah pendudukannya dan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual yang dapat mengganggu kondisi fisik personil militernya. Sistem *Comfort woman* bukan sekedar perintah dari atasan, melainkan kemauan dari Kaisar (Savitri, 2010). *Comfort station* memang dirancang sebagai sistem yang dapat memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis tentara Jepang. Tujuan Jepang dalam pembangunan sistem jugun-ianfu adalah untuk kepentingan militer Jepang sendiri (Komnas HAM, 2013).

George Hick menyebutkan sistem jugun ianfu dalam bukunya sebagai “*vast and dense network of sexual services pervading virtually all Japanese-occupied areas from the Siberian frontier in the north, to the Solomon Islands in the southeast, and Burma in the southwest*” (Hicks, 1995: 310). Sistem jugun ianfu ini dibangun diseluruh wilayah pendudukan militer Jepang. Pembentukan sistem jugun ianfu ini dibuktikan dengan penemuan *comfort station* (*ianjo*) yang dibangun oleh militer Jepang pertama kali di Shanghai pada tahun 1933. *Ianjo* ini diberi nama “*Disease Prevention and Hygiene Facility*” yang berisi 35 wanita Korea dan 3 wanita Jepang. Pada awalnya, wanita-wanita yang berada di *ianjo* merupakan pekerja seks yang didatangkan dari Jepang dan Korea, tetapi seiring bertambahnya jumlah personil militer Jepang, jumlah wanita yang menjadi jugun ianfu dirasa kurang, sehingga militer Jepang atas persetujuan dari Kaisar mengambil dari penduduk lokal secara paksa untuk memenuhi kuota jugun ianfu (Hicks, 1995: 311).

Ketika Jepang berhasil menduduki wilayah Indonesia, kaisar memerintahkan setiap divisi angkatan di Indonesia untuk membangun *comfort station*. Perintah ini dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen-dokumen

pemerintah mengenai pembangunan ian-jo (*comfort station*). Terdapat sedikitnya 127 dari 131 dokumen mengenai jugun-ianfu, 4 diantaranya menyebutkan adanya keterlibatan militer Jepang dengan praktek jugun ianfu di Indonesia. Dokumen tersebut memuat laporan mengenai tata cara pengelolaan pelacuran dan pengelolaan makanan di tempat tersebut. Dokumen resmi Jepang yang menyertakan ian-jo sebagai bagian dari sistem militer adalah sebuah bukti bahwa kaisar mengetahui adanya pembangunan ian-jo (Komnas HAM, 2010).

Bukti lain dari adanya sistem perbudakan seksual oleh militer Jepang di Indonesia ditunjukkan dalam telegram rahasia dari Komandan Jendral Tentara Selatan (yang menaungi wilayah Sumatera) kepada Komandan Tentara Taiwan, Rikichi Ando berjudul “Tai-den No.602” atau “Telegram Tentara Taiwan No.602”, tertanggal 12 Maret 1942. Catatan dalam dokumen ini menunjukkan bahwa telegram diterima oleh Kementerian Perang No.2259 pada 17 Maret 1942. Telegram ini berbunyi:

*Sehubungan dengan Telegram Rahasia Tentara No.63, kami diminta oleh Southern Army General Command untuk secepat mungkin mengirimkan 50 comfort women pribumi ke Borneo. Berdasarkan Telegram Rahasia Tentara No. 623, kami meminta izin perjalanan untuk 3 operator berikut ini [nama dihapus oleh otoritas Jepang], yang telah diinvestigasi dan diseleksi oleh polisi militer (Komnas HAM, 2013).*

Maksud dari telegram ini adalah basis militer Jepang yang ada di Borneo (Kalimantan) meminta kepada militer Jepang di wilayah Sumatera (*Southern Army*) untuk mengirimkan 50 orang jugun ianfu karena jumlah jugun ianfu yang ada di Borneo tidak mencukupi kuota yang dibutuhkan. Telegram ini juga dikirimkan kepada komandan tentara Taiwan pada tanggal 12 Maret 1942 sebagai pihak yang menaungi basis militer Jepang di Indonesia. Kemudian dari komandan tentara Taiwan juga diteruskan kepada Kementerian Perang Jepang tertanggal 17 Maret 1942 sebagai bahan laporan Kepada Kaisar Hirohito selaku pemimpin tertinggi militer Jepang.

Kementerian Perang Jepang kemudian memberikan telegram balasan kepada Komandan Tentara Taiwan pada tanggal 18 Maret 1942 dengan “*Riku-amitsu No. 188*” atau “Telegram Rahasia Tentara 188” yang berisi: “*otorisasi yang*

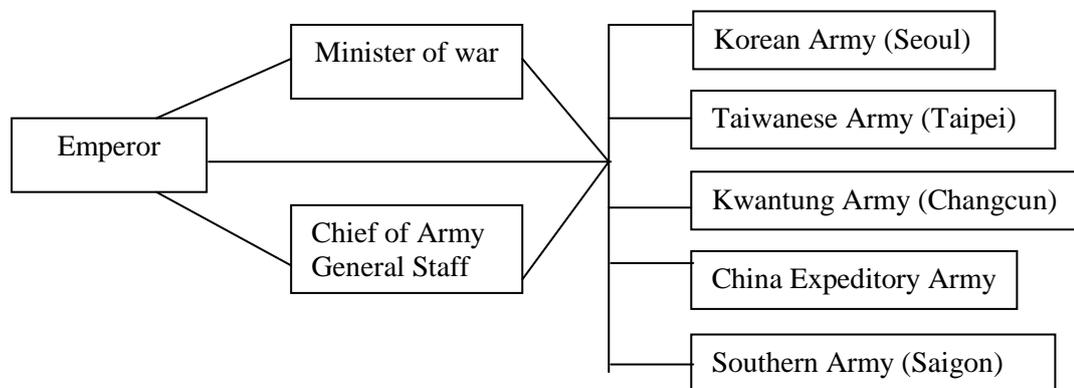
*diminta dalam Tai-den No. 602, tertanggal 12 Maret, bersama ini diberikan atas perintah dari otoritas tertinggi”* (Komnas HAM, 2013). Kedua bukti telegram ini membuktikan bahwa pemimpin militer Jepang terlibat langsung didalam pelaksanaan sistem “*comfort women*” dan pengelolaan “*comfort station*”. Telegram balasan dari Kementerian Perang Jepang berisi diberikannya persetujuan untuk mengirim jugun ianfu dari satu wilayah ke wilayah lain sebagaimana diminta dalam Tai-den No. 602 atau Telegram Tentara Taiwan No. 602 tanggal 12 Maret 1942. Dalam telegram ini, juga disebutkan adanya perintah dari “otoritas tertinggi”. Otoritas tertinggi yang dimaksud adalah Kaisar Hirohito yang pada saat itu merupakan pemimpin tertinggi militer Jepang pada masa Perang Dunia II. Isi telegram balasan ini dapat menjadi bukti bahwa kaisar memberikan perintah dan persetujuan secara langsung atas sistem jugun ianfu yang dilaksanakan militer Jepang di wilayah-wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya sistem hierarki yang kuat dalam tubuh militer Jepang dimana Kaisar memiliki kedudukan tertinggi menjadikan perintah kaisar harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua personil Angkatan Kekaisaran Jepang. Selain itu, militer Jepang juga memegang teguh doktrin *Imperial Rescript Armed Forces*, yang berisi sebuah pernyataan bahwa hormatilah perintah dari Kaisar sebagai perintah bersama. Sehingga, ketika Kaisar Hirohito memerintahkan untuk membuat sistem jugun-ianfu sebagai salah satu kebijakan militer Jepang dalam Perang Dunia II, seluruh personil militer melaksanakan perintah ini dengan sukarela sebagai wujud kepatuhan dan pengabdian kepada Kaisar. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya kejahatan perang berupa perbudakan seksual yang terorganisir (jugun ianfu) oleh militer Jepang pada masa Perang Dunia II di negara-negara pendudukannya, termasuk Indonesia.

### 3.3 Sistem “Comfort Women/Jugun Ianfu” yang diterapkan Militer Jepang di Indonesia

*Jugun Ianfu* terdiri dari lima buah kanji yang masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu 従 “pembantu atau pengikut”, 軍 “tentara”, 慰 “penghibur”, 安 “tenang atau senang”, 婦 “perempuan”, sehingga jika digabungkan berarti “wanita penghibur yang mengikuti tentara (Jepang) untuk memberikan kesenangan”. Namun pada kenyatannya, *jugun ianfu* bukanlah wanita yang secara sukarela menghibur tentara Jepang dengan tubuh mereka, melainkan dipaksa untuk memenuhi hasrat seksual para tentara Jepang (Yuki, 2002: 8). Apabila ditinjau dari segi organisasi, menurut Tanaka Yuki dalam bukunya yang berjudul “*Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution during World War II and The US Occupation*”, pembentukan sistem jugun ianfu dilakukan berdasarkan rantai kekuasaan dalam militer Jepang bisa dilihat pada bagan 3.1.

**Bagan 3.1.** Rantai Kekuasaan pada Sistem Jugun Ianfu



Sumber: Yuki, 2002

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sistem jugun ianfu berpusat pada pemerintah kekaisaran Jepang, lalu diturunkan kepada Menteri Perang dan Kepala Umum Staff Tentara Jepang. Kemudian diturunkan lagi kepada Kepala Staff Tentara di masing-masing wilayah pendudukan Jepang, seperti Korea, Cina, Taiwan, dan Negara-Negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tentara di wilayah pendudukan pada umumnya memiliki agen khusus untuk merekrut

perempuan-perempuan yang akan dijadikan jugun ianfu, baik dengan metode kekerasan maupun penipuan (Yuki, 2002: 23).

Praktik *Jugun Ianfu* dan pendirian *Comfort Station* (stasiun hiburan/*ian-jo*) pertama kali dilakukan militer Jepang di China pada tahun 1932 yang berpusat di Shanghai. Wakil Kepala Staf Pasukan Expedisi Shanghai, Yasuji Okamura adalah orang yang mencetuskan pembentukan *ian-jo* yang menyediakan *jugun ianfu* bagi tentara-tentara Jepang (Komnas HAM, 2013). Praktik ini kemudian dilanjutkan di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, seperti Korea dan negara-negara Asia Tenggara. Sebanyak 20.000 wanita Korea dijadikan budak seks oleh tentara Jepang atas permintaan dari Jendral Yoshijiro Umezu (pemimpin pasukan Jepang di wilayah Korea), baik di Korea maupun dikirim ke wilayah pedudukan Jepang lainnya (Lzee, 2003).

Pada awalnya, praktik jugun ianfu yang dilakukan oleh Jepang dilakukan dengan cara legal, yaitu membawa wanita penghibur dari Jepang atau Korea. Namun, sistem ini berubah menjadi sebuah eksploitasi dan perbudakan perempuan setelah wilayah jajahan Jepang semakin meluas dan jumlah wanita penghibur sebelumnya tidak mampu mencukupi kebutuhan tentara Jepang. Akhirnya militer Jepang melakukan perekrutan dengan cara lain, yaitu kekerasan, paksaan, penipuan (tawaran akan disekolahkan atau dipekerjakan di luar daerah), dan penculikan yang dilakukan pada perempuan-perempuan sipil di wilayah yang diduduki, termasuk di Indonesia (Yuki, 2002: 18).

Tanaka Yuki dalam bukunya juga yang berjudul “*Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution during World War II and The US Occupation*” mengklasifikasikan jugun ianfu ke dalam dua tipe, yang dijelaskan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1.** Tipe dan Perbedaan Jugun Ianfu

Baishi Yunfu (Pelacur/PSK)	Seiteki Dorei (Budak Seks)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendapat upah</li> <li>▪ Menemani tentara, seperti Geisha</li> <li>▪ Terdiri dari perempuan Jepang dan Korea, namun jumlah perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mendapat upah</li> <li>▪ Melayani kebutuhan seksual tentara Jepang</li> <li>▪ Terdiri dari perempuan di setiap</li> </ul>

<p>Korea lebih banyak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem yang dibentuk untuk mencegah tindakan pemerkosaan di medan perang</li> <li>▪ Dilakukan dengan kesadaran sang perempuan untuk mencari nafkah</li> </ul>	<p>daerah yang diduduki Jepang, seperti Cina, Korea, Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Singapura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem yang dibentuk akibat meluasnya daerah ekspansi Jepang, sehingga Baishi yunfu tidak mencukupi dan militer Jepang kekurangan dana untuk menggaji wanita penghibur</li> <li>▪ Direkrut secara paksa, dengan kekerasan, penipuan, penculikan, ancaman</li> </ul>
--	---

Sumber: Yuki, 2002

Setelah Jepang menyerang Indonesia dan berhasil menduduki Indonesia pada bulan Maret 1942, mereka mulai merekrut paksa wanita-wanita Indonesia, baik melalui kekerasan, pemaksaan, penipuan, penculikan, maupun ancaman. Wanita-wanita yang dijadikan budak seks haruslah wanita yang belum menikah dan berusia masih sangat muda, antara 13-17 tahun. Calon *jugun ianfu* ini kemudian dibawa ke rumah-rumah bordil (*ian-jo* yang berarti stasiun hiburan) yang didirikan oleh militer Jepang di Indonesia. Hal ini terbukti dari adanya sebuah dokumen tertanggal 13 Maret 1946 yang berisi kesaksian seorang pegawai sipil yang menceritakan bagaimana seorang perwira Jepang memaksa 100 wanita lokal di Kalimantan untuk telanjang bulat dan memasukkan mereka ke stasiun hiburan militer Jepang (Oktorino, 2016: 259).

Pendirian-pendirian dan perekrutan *jugun ianfu* di wilayah Indonesia ini diawali karena banyaknya kasus pemerkosaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh tentara Jepang ketika menduduki wilayah Indonesia. Wanita-wanita pribumi maupun Eropa yang berada di daerah, seperti Tarakan, Manado, Bandung, Padang, Yogyakarta, sebagian daerah di Jawa Tengah, dan Pulau Flores menjadi sasaran pemerkosaan tentara Jepang. Bahkan di Blora, 20 wanita pribumi

disekap di 2 rumah ditepi jalan raya selama 3 minggu dan diperkosa tentara Jepang berkali-kali (Oktorino, 2016: 260).

Militer Jepang memiliki kontrol penuh dalam pengorganisasian Sistem “*Comfort Women/Jugun Ianfu*” yang dibuktikan dari harus adanya persetujuan dari tingkat tertinggi pemerintah dan militer Jepang untuk mendirikan fasilitas-fasilitas perbudakan seksual di daerah pendudukannya untuk para perwira dan tentara Jepang. Stasiun-stasiun hiburan (*Comfort Station*) ini dikontrol langsung oleh Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Beberapa bukti yang menegaskan keterlibatan langsung pemerintah dan militer Jepang dalam pembentukan sistem ini dapat dilihat dari peranan Kementerian Perang Jepang yang membuat panduan resmi berjudul “*Berbagai Hal Mengenai Rekrutmen Perempuan*” yang digunakan untuk merekrut jugun ianfu, yang dikirim Jendral Perang kepada Kepala Staf Tentara di wilayah-wilayah pendudukan Jepang sejak tahun 1938 (Komnas HAM, 2013).

*Comfort station* pertama kali didirikan militer Jepang di Balikpapan atas perintah dari Letnan Yasuhiro Nakasone (kepala staf tentara di wilayah Balikpapan). Hal ini dibuktikan dari adanya sebuah telegram rahasia yang dikirim Letnan Yasuhiro kepada Kepala Staf Armada Wilayah Barat Daya tahun 1942 yang berisi persetujuan untuk mendirikan dan mengelola fasilitas perbudakan seksual, yang meliputi penentuan lokasi, penyediaan barang-barang, perekrutan dan pengangkutan perempuan, serta manajemen secara keseluruhan (Komnas HAM, 2013).

Satu tahun setelah pendudukan Jepang di Indonesia, militer Jepang (Tentara ke-16 yang bermarkas di Jawa) juga mendirikan *comfort station (ian-jo)* di Pulau Jawa atas mandat dari Tentara Wilayah ke-7. *Ian-jo* ini berlokasi di Jakarta, Bandung, Pekalongan, Magelang, Semarang, dan Bondowoso. Pada awalnya sebanyak 300 wanita pribumi di paksa untuk menjadi *jugun ianfu* di stasiun-stasiun hiburan yang disediakan militer Jepang. Jumlah ini semakin bertambah dalam perekrutan-perekrutan selanjutnya (Oktorino, 2016: 261).

Di Pulau Ambon, *comfort station* dibangun yang berisi ratusan wanita Indonesia yang dikumpulkan secara paksa dengan bantuan polisi sipil. Menurut

kesaksian Yasumasa Sakabe, salah satu staf di Markas Besar Pangkalan Pasukan Khusus ke-25, markas besar militer Jepang membuka empat station baru yang berisi sekitar 100-150 wanita Indonesia. Mereka menyeleksi wanita yang paling menarik dan bebas dari penyakit kelamin untuk kemudian dipaksa menjadi junganfu. Di daerah Sulawesi (bagian selatan Indonesia) terdapat 27 comfort station yang berisi sekitar 281 wanita Indonesia yang masih cukup muda. Angkatan Laut Jepang bertugas untuk mengawasi pengelolaan comfort station tersebut, di bawah pengawasan Kepala Departemen Urusan Negara yang bertindak sejjin Direktur Jendral Administrasi AL (Komnas HAM, 2010).

Berbeda dengan Jepang, personil militer Belanda ketika menduduki wilayah Indonesia memiliki cara lain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Kebijakan militer Belanda sendiri melarang praktik-praktik pemerkosaan oleh personil militernya, sehingga personil militer Belanda yang berniat memenuhi hasrat seksualnya akan datang ke rumah pelacuran yang ada di wilayah masing-masing. Cara lain yang dilakukan adalah dengan berhubungan atau menikahi wanita Indonesia, sehingga tidak ada unsur paksaan melainkan suka sama suka. Ada juga yang menjadikan wanita Indonesia sebagai pembantu di pos-pos militer Belanda, tetapi mereka juga dijadikan wanita simpanannya (Johari, 2018). Itjah dalam Historia edisi “Seks Serdadu Belanda” memberikan keterangan terkait wanita-wanita Indonesia yang dijadikan simpanan personil militer Belanda di Sumedang:

*“Saya hanya ingat tiga di antaranya yakni Ceu Ipoh, Ceu Isah dan Ceu Marni. Mereka semuanya bertugas sebagai tukang masak, tukang setrika dan tukang cuci baju para serdadu Belanda. Saya tidak tahu mereka bobogohan (pacaran) atau tidak, yang jelas mereka terlihat sangat akrab dengan tentara-tentara Belanda itu. Kadang saya lihat saling pegangan tangan,” (Johari, 2018).*

Dalam pengamatan Itjah, lima pembantu yang ada di pos militer Belanda itu sangat disayang oleh tentara Belanda. Mereka sering diberikan hadiah berupa uang, barang, atau makanan. Keterangan lain juga diberikan oleh J.C Princen sebagai eks serdadu Belanda yang dikirim ke Indonesia, *“Kami melakukannya dengan cara masing-masing. Ada yang sedikit memaksa, suka sama suka atau pergi ke para pelacur,” (Johari, 2018).* J.C Princen sendiri juga memiliki kekasih

seorang wanita Indonesia bernama Asmuna asal Bogor, tetapi Asmuna meninggal dunia ditembak oleh personil militer Belanda lain yang hendak melecehkannya. Sejak saat itu J.C Princen berbalik mendukung Indonesia dan akhirnya menikah dengan wanita Indonesia (Johari, 2018).

Kebijakan militer Jepang dan Belanda terkait pemenuhan hasrat seksual personil-personil militernya terbukti berbeda. Militer Belanda jelas melarang tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh personil militernya di Indonesia, sehingga masing-masing personil militer mencari jalan sendiri-sendiri untuk memenuhi hasrat seksualnya. Dan sebagian besar dari mereka menggunakan cara legal (datang ke tempat pelacuran) atau atas dasar suka sama suka. hal ini berbeda Berbeda ketika militer Jepang menduduki Indonesia. Sejak awal, militer Jepang menerapkan sistem jugun ianfu yang merekrut paksa wanita-wanita Indonesia untuk dijadikan budak seks personil militer Jepang. Personil militer Jepang juga tidak segan-segan melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap wanita-wanita di wilayahnya untuk memenuhi hasrat seksualnya.

Ketika militer Jepang menerapkan sistem jugun ianfu di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang dipaksa menjadi jugun ianfu tidak hanya ditempatkan di daerahnya sendiri, namun ada sebagian dari mereka yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke negara lain seperti Burma (Myanmar), Malaysia, dan Filipina. Wanita-wanita Indonesia yang dipaksa menjadi jugun ianfu tidak pernah mendapatkan bayaran dan harus bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan militer Jepang. Mereka harus berkali-kali melayani tentara Jepang yang datang ke *comfort station (ian-jo)*. Jika mereka menolak untuk melayani tentara Jepang, maka akan disiksa bahkan dibunuh (Komnas HAM, 2013).

Wanita-wanita yang dijadikan jugun ianfu ini tidak hanya mengalami pelecehan seksual, tetapi juga disiksa oleh tentara Jepang. Bentuk penyiksaan yang dilakukan berbeda-beda, apabila ada wanita yang menolak berhubungan seksual dengan tentara Jepang, maka akan digantung hidup-hidup, untuk wanita yang ketahuan menderita penyakit kelamin akan dibakar atau diledakkan dengan granat, sedangkan wanita yang ketahuan hamil, kandungannya akan digugurkan

tanpa menggunakan obat bius, perutnya akan diremas oleh 4 orang tentara Jepang hingga keguguran. Bentuk-bentuk penyiksaan lainnya seperti dicambuk, ditendang atau dipukul, disulut besi panas, bahkan ditembak dengan bayonet juga dialami *jugun ianfu* (Oktorino, 2016: 262).

Sistem *Comfort Women* atau jugun ianfu yang dilakukan militer Jepang di Indonesia memiliki pola yang sama dengan sistem *Comfort Women* di negara pendudukan Jepang lainnya. Sistem ini meliputi:

### 1) Proses Perekrutan

Pada proses ini, wanita-wanita Indonesia ada yang direkrut secara paksa yaitu dengan cara diculik, diancam akan dibunuh jika tidak mengikuti perintah militer Jepang, atau dilukai secara fisik. Cara lain yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia adalah militer Jepang mewajibkan banyak keluarga untuk menyerahkan anak gadisnya yang berusia 15 tahun dan belum menikah (Komnas HAM, 2010).

Selain itu, ada juga yang ditipu dengan cara menawarkan pendidikan atau pelatihan khusus, seperti yang dialami Mardiyem yang saat itu berusia 13 tahun dan terpaksa harus menjadi jugun ianfu. Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya “Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer” menerangkan adanya bukti penipuan yang dilakukan oleh militer Jepang menurut keterangan Soeryo Hadi, bekas anggota pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Perwakilan Surabaya:

*“...dalam tahun 1943 kakak saya mengatakan bahwa pemerintah pendudukan Dai Nippon menyerukan kepada setiap orangtua yang mempunyai anak gadis agar segera mendaftarkan kepada pemerintah anak gadisnya. Adapun maksud pendaftaran, mereka akan disekolahkan. Sehubungan dengan ini, di Ungaran telah didaftar anak-anak gadis dari umur 1-17 tahun sejumlah 5 orang. Mereka didaftar dan dibawa ke Semarang guna pengurusan selanjutnya”* (Ananta, 2007: 34).

Pada beberapa kasus, pejabat atau tokoh sipil di daerah pendudukan Jepang juga terlibat dalam proses perekrutan dan pengumpulan wanita-wanita

yang akan dijadikan jugun ianfu. Berdasarkan Catatan harian Operasi Kementerian Perang Jepang di Indonesia menyatakan bahwa “*para kepala di wilayah-wilayah Indonesia ditugaskan untuk mengumpulkan wanita sesuai kuota yang ditentukan dan mengelola comfort station*” (Komnas HAM, 2010).

## **2) Proses Pengangkutan**

Sebelum calon-calon jugun ianfu diangkut ke daerah yang terdapat comfort station, mereka diwajibkan untuk mengikuti pengecekan kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengidap penyakit menular seksual dan tidak ada yang hamil. Setelah itu, mereka barulah dibawa ke daerah tujuan dengan menggunakan truk atau kapal perang dan dijaga ketat oleh anggota militer Jepang. Bahkan sebagian dari mereka ada yang diangkut ke negara lain. Berdasarkan kesaksian Mardiyem (salah satu korban jugun ianfu), ia dibawa paksa dari Yogyakarta ke Banjarmasin (Komnas HAM, 2010).

## **3) Proses Penempatan Di *Comfort Station/Ian-jo***

Setelah sampai di comfort station, wanita-wanita ini dipaksa masuk ke ruangan-ruangan yang berbeda dalam satu bangunan. Bangunan yang biasanya dipakai sebagai comfort station adalah kamp pangkalan militer, rumah, hotel, asrama, atau rumah sakit yang diambil alih militer Jepang. Wanita-wanita ini diberikan nama-nama Jepang yang ditempel di pintu ruangnya. Bagi wanita-wanita korban penipuan dan tidak mengetahui akan menjadi jugun ianfu, mereka harus menjalani tes kesehatan terlebih dulu ketika sampai di ian-jo. Wanita-wanita yang terkena penyakit menular seksual akan langsung dibunuh atau ditenggelamkan di sungai (Komnas HAM, 2010).

Wanita-wanita yang sudah sampai di comfort station akan langsung dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Bagi wanita yang tidak mampu memuaskan tentara Jepang akan dikurung, disiksa, dan tidak diberi makanan. Bagi jugun ianfu yang melarikan diri, jika tertangkap akan langsung ditembak atau disiksa hingga meninggal dunia. Mereka dipaksa untuk melayani rata-rata 15-30 orang setiap harinya (Komnas HAM, 2013).

### 3.4 Kesimpulan

Budaya Organisasi (*organizational culture*) sama seperti ideologi yang mempengaruhi pemikiran, keyakinan, dan tindakan individu yang termasuk di dalamnya. Dalam sebuah organisasi militer, doktrin militer membentuk kepatuhan para personel militer terhadap tujuan perang negaranya dan komando militer dari atasannya, sehingga mereka cenderung mengabaikan hukum humaniter internasional. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang dimiliki oleh militer berbentuk doktrin militer. Dalam Angkatan Kekaisaran Jepang, doktrin militer ini adalah *Imperial Prescript Armed Forced* yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1942 berisi 5 point utama yang menekankan untuk menghormati perintah dari atasan sebagai perintah bersama. Seorang tentara harus mematuhi segala perintah atasan tanpa harus menggunakan alasan rasional atau alasan moral. Bukti pelaksanaan doktrin ini terlihat dalam peristiwa *The Rape of Nanking* pada tahun 1937 yang mengakibatkan pembunuhan dan pemerkosaan massal oleh personel militer Jepang karena adanya perintah dari pemimpin militernya secara langsung. Pola serupa juga dilakukan di negara-negara pendudukan Jepang lainnya, termasuk Indonesia.

Dengan adanya doktrin ini juga, seluruh personel militer Jepang tunduk dan patuh terhadap segala perintah Kaisar sebagai pemimpin tertinggi militer Jepang dan sosok yang diagungkan. Salah satu perintah Kaisar ketika terjadinya Perang Dunia II adalah untuk membangun sistem jugun ianfu di negara-negara pendudukan Jepang, yang dibuktikan dengan penemuan pembangunan ianjo pertama di Shanghai tahun 1933 dan telegram rahasia militer Jepang yang menunjukkan perintah pengiriman jugun ianfu di wilayah Indonesia yang disetujui oleh kaisar. Dengan adanya perintah dan persetujuan dari kaisar, militer Jepang tunduk dan melaksanakan pembangunan sistem jugun ianfu yang kemudian menjadi salah satu bentuk kejahatan perang Jepang di negara-negara pendudukannya, termasuk di Indonesia pada masa Perang Dunia II 1942-1945.